

KOMERSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) MELALUI LISENSI

OLEH

DRA. ENDAR HIDAYATI, MPA

**Kepala Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
Daerah Istimewa Yogyakarta**

DISAMPAIKAN PADA

**Workshop Lisensi dan Komersialisasi HKI
Bagi Dosen Universitas Negeri Yogyakarta
29 AGUSTUS 2014**

KOMERSIALISASI HKI MELALUI MEKANISME LISENSI

Key word: Komersialisasi - Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Lisensi

Dalam dinamika perdagangan internasional pada saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi isu yang sangat penting berkait dengan posisinya yang mampu memberikan kedudukan kuat bagi suatu negara industri. Lisensi merupakan salah satu pertimbangan pengembangan nilai ekonomi (komersialisasi) HKI melalui proses alih teknologi (*transfer of technology*). Proses ini melibatkan peran Negara, pemilik HKI, dan pengguna hasil HKI (pengusaha/investor). Maksimalisasi hak ekonomi (*economic right*) yang secara eksklusif berada di tangan pemilik/pemegang HKI seringkali menunjukkan pengejaran keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga alih teknologi yang diharapkan tidak terjadi. Pemberian lisensi melalui pelaksanaan HKI tidak serta-merta mengalihkan seluruh klaim komersial atas HKI tetapi terbatas pada seberapa jauh pihak pemberi lisensi dan penerima lisensi mempertimbangkan manfaat komersial masing-masing pihak.

A. Pendahuluan

Sejak tahun 1980-an HKI tidak lagi semata-mata menjadi persoalan hukum (hukum perdata) tentang kepemilikan, tetapi telah berkembang memasuki arena perebutan kekuasaan ekonomi yang melibatkan pejabat publik Negara sehingga terseret kearah dinamika politik. Perilaku ekonomi yang melingkupi HKI tidak sedikit diperankan oleh tokoh Negara dan tidak lagi sebatas tokoh bisnis. Oleh karena dalam perdagangan internasional dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi. Hal ini karena isu HKI tidak lagi hanya menjadi masalah teknis hukum, tetapi menyangkut bisnis, bahkan beberapa negara besar tertentu berusaha mempengaruhi percepatan perkembangan HKI melalui mekanisme pasar, dan menggunakan media hukum untuk memperkembangkan konspisi KHI. (Negara Amerika dan Inggris merupakan pemegang kendali dalam harmonisasi hukum dunia).

Minat seseorang untuk merancang dan mengembangkan kreatifitas dan inovasi di bidang HKI adalah untuk memperoleh Hak Eksklusif yang terkandung dalam Hak Ekonomi (*Economic Right*) di samping Hak Moral (*Moral Right*) yang melekat pada HKI dan diakui dalam konvensi-konvensi HKI internasional. Hak eksklusif ini dikategorikan memiliki nilai komersial yang dapat diperoleh dari hasil melaksanakan HKI. Namun demikian tidak semua pemilik HKI melaksanakan sendiri haknya tersebut, ada yang memberikan hak ekonominya itu kepada pihak lain. Untuk kepentingan ini

sistem HKI memiliki wadah hukum yaitu pemberian “lisensi” yang melahirkan akibat finansial berupa “**royalti**”. Lisensi menggambarkan pemberian izin kepada pihak yang bukan pemilik/pemegang HKI untuk mengambil manfaat ekonomi dari HKI milik seseorang. Setidaknya tujuan pemberian lisensi HKI kepada pihak lain adalah dengan pertimbangan perluasan dan percepatan peredaran HKI yang dimilikinya karena keterbatasan untuk melakukan sendiri peredaran tersebut, di samping itu bertujuan menyebarkan manfaat HKI untuk kepentingan akses masyarakat atas suatu benda HKI.

Peraturan perundang-undangan terkait dengan HKI di Indonesia (UU Hak Cipta, UU Paten, UU Merek, UU Desain Industri, UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Rahasia Dagang), Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dan Alih Teknologi memberi ruang yang memungkinkan pengalihan hak atas HKI melalui melalui mekanisme lisensi juga melalui kontrak perdata antara pemilik/pemegang HKI dengan pihak lain yang juga menginginkan memperoleh manfaat komersial dari produk HKI tersebut.

Kemajuan teknologi dipandang sebagai kemajuan peradaban manusia, bahwa semakin maju teknologi suatu bangsa dianggap lebih beradab pula, sebab akses dari kemajuan teknologi itu dapat bermanfaat buat manusia untuk memperoleh kemudahan, kenyamanan dan kesejahteraannya (Makkawaru, 2001:117). Menurut Kunieda (dalam Purwaningsih, 2005:141) bahwa masalah pengalihan teknologi tidak lepas dari sudut pandang makroekonomi dan mikroekonomi. Dari sudut makroekonomi alih teknologi merupakan suatu hal yang sangat efektif bagi suatu Negara berkembang untuk mengejar Negara maju. Keberhasilan ekonomi dari sudut pandang ini didorong oleh: (1) globalisasi aktivitas bisnis, dan (2) makin meningkatnya perhatian dunia terhadap hak milik intelektual. Dari sudut mikroekonomi, yakni dari kacamata perusahaan yang berhubungan dengan manajemen bisnis melalui lisensi, dan oleh karenanya alih teknologi (*transfer of technology*) merupakan salah satu alasan untuk digunakannya mekanisme lisensi. Disadari bersama bahwa salah satu hal utama untuk menyempurnakan perkembangan ekonomi adalah melalui alih teknologi itu (Margono dan Angkasa, 2003:117).

Seringkali diungkapkan bahwa tujuan diciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah dalam rangka mempermudah dan meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Perkembangan positif ini dapat ditelusuri dalam bidang komputer (mikro-elektronika), sains bahan, bioteknologi, dan teknologi informasi. Contoh sederhana dalam bidang komputer (mikro-elektronika) adalah manfaatnya dalam bidang

pendidikan. Pesatnya perkembangan dunia pendidikan makin efisien dan berkualitas tinggi berkat bantuan teknologi komputer (Anwar, 2000:2).

Dengan demikian perlindungan hukum atas penemuan dan penciptaan yang dimaksud harus ditegakkan. Syahmin (2006:134-135) mengemukakan landasan pemikiran perlindungan hukum atas HKI itu dengan pemikiran sebagai berikut:

- a. Tidak semua orang memiliki kemampuan menemukan sesuatu yang baru (kreativitas) dan diterima oleh umum, seperti karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi, kesusastaan, industri, karya seni, merek dagang, serta karya cipta atas rekaman suara dan lain-lain;
- b. Tidak semua orang mempunyai talenta (bakat dan keterampilan) dalam suatu bidang tertentu yang hasil ciptaannya (*copyright*) banyak diminati dan bermanfaat untuk khalayak ramai;
- c. Tidak semua orang memiliki banyak waktu, tenaga dan biaya untuk menemukan (*patent*) atau menciptakan (*copyright*) karya yang hasilnya bermanfaat untuk kepentingan umum;
- d. Pencipta HKI, di samping harus mempunyai bakat, tenaga, waktu, dan juga sangat membutuhkan banyak dana untuk membiayainya.

B. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pengelompokan HKI meliputi Hak Cipta (*copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*), lingkup hak cipta (*Copyright*) meliputi Hak Cipta itu sendiri dan Hak Terkait. Sedangkan hak milik perindustrian (*Industrial Property Right*) meliputi Hak Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Merek Dagang (*Trade Mark*), Sumber Tanda dan Sumber Asal (*Indication of Source or Appellation of Origin*). Perkembangan terakhir WTO melahirkan dua bidang HKI baru, yakni Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*New Varieties of Plant Protection*) dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*) (Muhammad, 2001:5). Di forum PBB sementara ini beberapa negara telah memperjuangkan pengakuan jenis hak kekayaan intelektual yang baru yakni *Traditional Knowledge*.

Pemerintah RI telah mengeluarkan enam jenis HKI, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi Hak Cipta (UU No. 9 Tahun 2002), Paten (UU No. 14 Tahun 2001), Merek (UU No. 15 Tahun 2001), Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

(UU No. 32 Tahun 2000). Keenam jenis HKI ini prosedur pendaftarannya melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sedangkan jenis HKI yang lain prosedur pendaftarannya melalui Kementerian Pertanian RI yakni Perlindungan Varietas Tanaman (UU No. 29 Tahun 2001).

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Pencipta atau Penerima Hak untuk menggunakan ciptaanya itu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam eksklusivitas hak cipta terkandung Hak Ekonomi (*Economic Right*) dan Hak Moral (*Moral Right*). Mengembangkan hak ekonomi berarti mengembangkan nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu karya cipta. Potensi finansial hak cipta adalah:

- a. Hak perbanyakan-penggandaan, yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan;
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio;
- c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain;
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu. Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang karena diharapkan kepada inventornya untuk mengembangkan lagi invensi baru. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memperoleh akses manfaat dari paten itu sehingga jika jangka waktu perlindungan telah dilampaui maka produk yang dipatenkan itu menjadi milik umum (*public domein*). Proses alih teknologi banyak didapatkan dalam mekanisme lisensi paten. Maksud diberikannya Hak Paten adalah agar setiap penemuan dibuka untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi masyarakat dan perkembangan teknologi.

C. Lisensi

Pengertian lisensi berasal dari bahasa Latin “*Licentia*” (Saleh, 1991:11). Mekanisme lisensi, memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang atau pihak lain untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dipergunakannya. Menurut Widjaja (2001:7), lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dari *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Dengan demikian kewenangan yang ada pada pencipta diserahkan kepada pihak lain melalui lisensi. Dicontohkan dalam Hak Cipta, semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memiliki lisensi. Jika tidak memiliki lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta itu maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang telah menetapkan pemberian hak kepada seorang pencipta.

Berdasarkan bidang kekayaan intelektual dikenal 3 kategori lisensi, yaitu lisensi teknologi, lisensi publikasi dan hiburan, dan lisensi merek dan barang dagangan. Menurut Tim Lindsey lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi (pemegang lisensi) untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dimiliki pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.

Berdasarkan sifatnya lisensi digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu lisensi eksklusif, lisensi non-eksklusif dan *sole licence*. Lisensi eksklusif merupakan perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI tertentu kepada pemegang lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan. Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI tersebut kepada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu berlakunya lisensi, kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif. Lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian lisensi dimana pemilik lisensi dapat memberikan lisensi kekayaan intelektualnya kepada pemakai lisensi lainnya dan juga menambah jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama. *Sole licence* adalah suatu lisensi dimana pemberi lisensi hanya boleh memberi lisensi kepada satu pihak tetapi si pemberi lisensi masih diperbolehkan mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut.

Dari semua peraturan perundangan bidang HKI, pada dasarnya yang dimaksudkan dengan lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dimiliki pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.

a. Cakupan lisensi

Cakupan lisensi yaitu batasan mengenai apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap HKI yang dialihkan dan biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi mencakup paling tidak:

1. Menentukan cakupan wilayah
2. Mengidentifikasi pemilik HKI dan hak-hak mereka
3. Menjelaskan pemegang HKI dan hak-hak mereka dalam menggunakan HKI
4. Menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan melindungi HKI (biasanya pemilik)
5. Menentukan apakah lisensi bersifat eksklusif atau non-eksklusif
6. Menentukan jangka waktu lisensi (misalnya, satu tahun, tiga tahun dan sebagainya)
7. Menentukan apakah lisensi tersebut dapat diperpanjang termasuk persyaratannya
8. Menguraikan tindakan atau kejadian yang melanggar kesepakatan
9. Menguraikan tindak atau kejadian yang secara otomatis mengakhiri kontrak
10. Memutuskan prosedur penyelesaian sengketa
11. Menentukan mengenai peningkatan, pembatalan, pelanggaran, dan sub-lisensi
12. Menentukan hukum yang mengatur masalah kontrak ini.

Dalam peraturan perundangan mengenai HKI di Indonesia disebutkan bahwa perjanjian lisensi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI pada Kementerian Hukum dan HAM RI, dan bila tidak dicatatkan maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga. Namun kenyataannya, hingga saat ini peraturan mengenai lisensi belum disahkan walaupun rancangan peraturan pemerintah tersebut telah beberapa kali disusun dan diperbaiki. Menurut Insan Budi Maulana, belum disahkannya peraturan pemerintah tersebut menimbulkan kesan adanya “tarik-ulur” antara Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Sekretariat Negara serta kemungkinan lobi industri farmasi asing yang keberatan dengan pengesahan peraturan pemerintah tersebut.

b. Persyaratan dalam perjanjian lisensi

Membuat konsep perjanjian lisensi merupakan hal yang penting. Jika syarat-syarat pembuatan lisensi tidak dinegosiasikan dan disetujui oleh para pihak, hukum akan menyikapi (atau menganggap) bahwa para pihak tadi tidak membuat persyaratan apapun dalam perjanjian mereka. Sebagai contoh:

- kecuali suatu perjanjian lisensi secara eksplisit menyatakan lisensi tersebut eksklusif, hukum seringkali menganggap bahwa lisensi-lisensi tersebut adalah non-eksklusif.
- seorang pemegang lisensi HKI dianggap mendapatkan semua hak-hak kepemilikan atas HKI selama jangka waktu yang diperjanjikan.
- kecuali perjanjian lisensi menentukan suatu jangka waktu (misalnya, satu tahun), hukum akan menyimpulkan jangka waktu yang pantas, yang tentunya bervariasi untuk kasus-kasus tertentu.
- kecuali perjanjian lisensi menentukan tanggal akhir perjanjian (atau jelas mengenai, berapa kali perjanjian dapat diperpanjang dan untuk berapa lama), hukum akan menganggap bahwa perjanjian lisensi tersebut secara otomatis bisa diperpanjang. Bahkan, jika ada sengketa tentang pemutusan perjanjian hukum akan menyikapi masa pemberitahuan yang panjang (misalnya, 3 bulan sampai 2 tahun) sebelum perjanjian tersebut diakhiri secara hukum.

c. Keuntungan dan Kerugian Perjanjian Lisensi

1. Bagi Pemberi Lisensi

a) Keuntungan

- Lisensi dapat membantu perusahaan sebagai pemilik lisensi yang tidak dapat membuat produk atau tidak ingin terlibat dalam pembuatan produk dengan mempercayakan pada kapasitas produksi, distribusi outlet, pengetahuan dan manajemen lokal yang lebih baik dan keahlian lain dari satu atau lebih partner sebagai penerima lisensi;
- Lisensi memungkinkan pemilik lisensi mempertahankan kepemilikan kekayaan intelektual dalam hal teknologi dan memperoleh keuntungan ekonomi, biasanya dalam bentuk pendapatan royalti;
- Lisensi juga dapat membantu perusahaan (pemilik lisensi) untuk mengkomersialisasi teknologinya atau mengembangkan operasinya saat ini ke dalam pasar-pasar yang baru secara lebih efektif dan dengan kemudahan yang lebih besar daripada dilakukan sendiri;
- Lisensi dapat digunakan untuk mendapatkan akses ke pasar-pasar yang baru yang sebelumnya tidak dapat diakses. Penerima lisensi setuju

untuk membuat semua penyesuaian yang diperlukan untuk masuk ke pasar asing, seperti terjemahan label dan instruksi; modifikasi barang-barang sehingga sesuai dengan undang-undang dan peraturan lokal; dan penyesuaian dalam pemasaran. Biasanya, penerima lisensi akan bertanggung jawab penuh untuk produksi lokal, lokalisasi, logistik dan distribusi;

- Perjanjian lisensi dapat juga memberikan sarana untuk mengubah pelanggan atau kompetitor menjadi sekutu atau partner dengan menghindari atau menyelesaikan proses pengadilan, yang mungkin mendapatkan hasil yang tidak pasti atau mungkin memakan biaya dan/atau waktu.

b) Kerugian

- Penerima lisensi dapat menjadi pesaing dari pemberi lisensi terutama jika diberikan hak untuk beroperasi dalam wilayah yang sama. Penerima lisensi dapat “menggerogoti” penjualan dari pemberi lisensi yang menyebabkan pemberi lisensi kurang mendapatkan royalti . Penerima lisensi sebaiknya efektif atau mendapatkan pasar lebih cepat daripada pemberi lisensi karena mempunyai biaya pengembangan yang lebih sedikit atau lebih efisien.
- Perjanjian lisensi dapat menjadi tidak menguntungkan ketika teknologi tersebut tidak didefinisikan dengan jelas atau tidak lengkap. Dalam kasus demikian pemberi lisensi diharapkan untuk melanjutkan kerja pengembangan dengan biaya yang besar untuk memuaskan penerima lisensi.
- Pemberi lisensi dapat menjadi bergantung secara kritis pada keahlian, kemampuan dan sumber daya dari penerima lisensi untuk menghasilkan keuntungan.

2. Bagi Penerima Lisensi:

a) Keuntungan

- Perusahaan penerima lisensi dapat mencapai pasar lebih cepat dengan teknologi inovatif karena perjanjian lisensi memberikan akses ke teknologi.
- Perusahaan yang tidak mempunyai sumber daya untuk melakukan riset sendiri dan perkembangannya dapat melalui lisensi, memperoleh akses ke kemajuan-kemajuan teknis yang diperlukan untuk menyediakan produk-produk baru atau yang lebih unggul.

- Terdapat kesempatan menerima lisensi ketika dipasangkan dengan portfolio teknologi perusahaan yang sekarang, dapat menciptakan produk-produk, layanan dan kesempatan pasar yang baru.
- b) Kerugian
- Penerima lisensi kemungkinan telah membuat komitmen keuangan untuk suatu teknologi yang tidak “siap” untuk dieksploitasi secara komersial, atau yang harus diubah untuk memenuhi kebutuhan bisnis penerima lisensi.
 - Suatu lisensi teknologi dapat menambah pengeluaran ke produk yang tidak didukung oleh pasar untuk produk itu. Tidak masalah untuk menambahkan teknologi baru, tetapi hanya jika biayanya ditanggung pasar dalam hal harga yang dapat ditagih. Berbagai teknologi yang ditambahkan ke suatu produk dapat menghasilkan produk yang kaya dengan teknologi yaitu terlalu mahal untuk dipasarkan.
 - Perusahaan yang bergantung pada teknologi yang dilisensikan dapat menjadi terlalu tergantung secara teknologi, yang pada akhirnya dapat menjadi hambatan terhadap ekspansi masa depan mereka atau kemampuan mereka untuk menyesuaikan, merubah atau menyempurnakan produk mereka untuk pasar yang berbeda.

Sedangkan menurut Nicolas S. Gikkas (Widjaja, 2001:15-17) alasan seorang pengusaha memilih pemberian lisensi dalam pengembangan usahanya, yakni:

- 1) Lisensi menambah sumberdaya pengusaha pemberi lisensi secara tidak langsung;
- 2) Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
- 3) Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
- 4) Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
- 5) Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar;
- 6) Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetisi hingga pada suatu batas tertentu;
- 7) Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan *trade off* (barter) teknologi;

- 8) Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan *goodwill* dari pemberi lisensi;
- 9) Sampai batas tertentu Pemberi lisensi melakukan kontrol atas jalannya kegiatan usaha yang diselesaikan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Lisensi pada umumnya memiliki beberapa unsur, yang menurut Widjaja (2001:45) dipilah sebagai berikut:

- a. Adanya izin yang diberikan oleh pemegang hak;
- b. Izin diberikan dalam bentuk perjanjian;
- c. Izin merupakan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi (bukan bersifat pengalihan hak);
- d. Izin diberikan untuk hak yang diberi perlindungan;
- e. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu, dan syarat tertentu.

Pemilik HKI dan atau pemegang hak yang telah memiliki kewenangan menggunakan produk berHKI yang dikuasainya, tertutup untuk dipergunakan oleh pihak lain jika pemegang hak itu tidak memperkenankan produknya dipergunakan oleh pihak lain. Pemberian izin merupakan bentuk perkenan yang diwujudkan ke dalam lisensi. Lisensi diberikan dalam bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam rangka pemenuhan suatu prestasi. Seberapa besar prestasi yang telah disepakati tergambar dalam klausul perjanjian yang dibuat. Peraturan perundangan mengenai HKI mensyaratkan seluruh perjanjian yang bermaksud mengadakan pengalihan hak termasuk lisensi di bidang HKI wajib dilakukan secara **tertulis**.

Pemberian hak melalui lisensi menurut konsep HKI hanyalah sebatas pengalihan hak untuk menikmati secara ekonomi sehingga penghormatan berupa pencantuman nama pemilik atas suatu barang yang telah dilisensikan tetap harus ada. Pemegang hak lisensi hanya berkenan sebatas hak yang dilisensikan, tidak tertutup kemungkinan luas hak yang diliputi suatu pemilikan HKI tidak dilisensikan secara keseluruhan. Demikian pula pemegang hak tidak dapat melisensikan suatu hak melebihi dari yang merupakan bagian yang dimiliki/dipegang dalam suatu produk HKI.

Pemilikan HKI berdasarkan jenis HKI terdapat perbedaan satu sama lain dalam hal waktu pemilikannya sehingga lisensi pun dibatasi oleh jumlah waktu tersebut. Lisensi hanya dapat diberikan sepanjang waktu pemilikan HKI atau kurang dari itu. Lisensi juga tetap dibatasi oleh syarat-syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak. Pemberian lisensi yang dilakukan dengan perjanjian lisensi tidak dapat dilepaskan dari strategi bisnis

yang diperankan oleh pengusaha yang senantiasa aktif mencari jalan bagi hasrat bisnisnya. Setidaknya terdapat tiga maksud dan tujuan dari strategi bisnis yang dapat dikemukakan (Insan Budi Maulana dalam Sujatmiko, 2008:98) yakni: Pertama, tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, pemasaran dan mengatasi persaingan tetapi selalu dengan merek dagang dan nama dagangnya, kedua: mencegah kompetitor curang, dan ketiga: menguasai pasar.

Salah satu bentuk perdagangan yang sangat lekat bentuknya dengan lisensi adalah waralaba atau *franchise*. Secara internasional tercatat nama besar perusahaan waralaba seperti Century 21 International, Pizza Hut, Dunkin Donuts, Holiday Inn, Mc Donalds, Pazza Hut, Toyota, Coca Cola, Kentucky Fried Chickens. Mengikuti selera bisnis internasional pebisnis dalam negeripun tergiur untuk mengembangkan model perdagangan ala waralaba sehingga di Indonesia saat ini memiliki berbagai macam waralaba yang dikembangkan ke daerah-daerah/kota-kota lain bahkan ke luar negeri. Tercatat waralaba Es Teler 77, kosmetik Sari Ayu, J-co Donat, Kopi Luwak, Apotek K-24, RM Padang Sederhana, Bebek Gureng Pak Gendut, Sop Ayam Pak Min Klaten, Bimbingan Belajar Neutron, dan berbagai waralaba dalam industri makanan dan rumah makan lainnya.

Lisensi terdiri dua macam yakni lisensi biasa (lisensi umum) dan lisensi wajib/lisensi paksa (*compulsory licensing*). Lisensi biasa/umum merupakan lisensi yang dilakukan melalui kontrak dengan kerelaan kedua belah pihak berdasarkan prinsip saling menguntungkan secara bisnis. Lisensi cara demikian tergambar dalam pola saling mendekati, mempelajari dan menganalisis invensi dan kreativitas yang yang dilahirkan, "mengendus" potensi bisnis, sementara di lain pihak inventor dan pencipta/kreator mulai menaruh target finansial dan komersial yang mungkin diperolehnya. Seorang inventor/kreator dapat menutup perjanjian lisensi dengan membatasi kewenangan tertentu atau membatasi luas lingkup invensi/ciptaan yang dilisensikannya. Bahkan inventor berhak untuk tidak melisensikan invensinya sama sekali, tentunya dengan alasan tertentu. Dengan pertimbangan bahwa suatu invensi dan karya kreasi tertentu sangat dibutuhkan untuk kepentingan negara, masyarakat dan kemanusiaan, atas sebuah karya HKI dapat saja dimohonkan atasnya sebuah lisensi yang dikenal dengan lisensi wajib/lisensi paksa. Apapun bentuk lisensi yang dilakukan tidak boleh melanggar ketertiban umum dan merugikan kepentingan negara.

Lisensi untuk membuat dan memproduksi suatu barang (benda/jasa) dimungkinkan dan bisa terjadi karena adanya suatu perjanjian antara pemilik HKI dengan pihak penerima

lisensi, dimana harus memproduksi barang yang sama kualitasnya. Lisensi yang dibuat dengan pihak baik di dalam negeri maupun pihak asing di luar negeri, biasanya melibatkan peran Pemerintah/Negara. Untuk menjaga pasar di suatu negara, sementara negara itu masih melarang impor barang² tsb. Prinsip tidak ingin kehilangan pasar, sehingga mengizinkan perusahaan setempat untuk memproduksi barang tsb melalui perjanjian lisensi yang disertai bantuan teknik.

Mekanisme lisensi ternyata berpotensi memiliki permasalahan, secara umum sebagai berikut:

a. Adanya Pasal Pengikatan (*Tie in Clause*)

Sering ditemukan adanya pasal-pasal pengikatan (*Tie in Clause*). Klausul ini mengharuskan pemegang lisensi untuk membeli produk atau jasa dari pemberi lisensi atau pihak lain yang ditunjuknya. (Sebenarnya klausul ini bukan masalah sepanjang produk/jasa dari pemberi lisensi ini diperlukan untuk kepentingan produksi dari pemegang lisensi, misal berkaitan dengan peralatan, bahan baku, jasa ahli dari pemberi lisensi). Persoalan timbul bila pemegang lisensi diharuskan membeli produk atau jasa lain yang tidak diperlukan pemegang lisensi sehingga merugikan pemegang lisensi dan negara karena potensial terjadi praktek impor terselubung dan praktek perdagangan tidak jujur.

Pemegang lisensi diikat dengan berbagai kewajiban terutama terkait dengan bahan baku, komponen untuk impor dari pemberi lisensi di LN. Peluang impor bahan baku dan komponen dari pihak ketiga tidak terbuka sebab Pemegang lisensi harus meminta persetujuan dari pemberi lisensi, termasuk bahan baku yang diperoleh di dalam negeri juga harus disetujui dari pemberi lisensi.

Klausul pengikatan telah menjadi bagian dari perjanjian lisensi karena setiap perjanjian lisensi memuat klausul ini. Sepanjang diperlukan dan memberi manfaat bagi penerima lisensi di Indonesia tidak perlu dipersoalkan eksistensinya (namun hal ini potensial menimbulkan kerugian bagi negara dari sektor pajak impor dan mengalirnya devisa ke luar negeri tidak terkontrol). Oleh karena itu kewajiban Pemerintah untuk waspada dalam menerima perjanjian lisensi dengan klausul pengikatan, terutama pada saat perjanjian lisensi dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI, Pemerintah harus berani menolak perjanjian lisensi yang demikian.

b. Bantuan Teknik (Technical Assistance)

Klausul pengikatan biasanya diikuti dengan program bantuan teknik (*Technical Assistance*) dengan mengirimkan beberapa tenaga teknik kepada pemberi lisensi atau pihak pemegang lisensi dengan mendatangkan expert dengan berbagai fasilitasnya. Program bantuan teknik ini dapat diatur tersendiri dalam perjanjian yang terpisah dari perjanjian lisensinya, tetapi tak jarang program ini diatur menyatu dengan perjanjian lisensinya. Melalui program ini diharapkan alih teknologi pada menerima lisensi terjadi.

Perjanjian bantuan teknik (*technical assistance*) terdapat banyak ragam bentuknya tetapi dari segi substansinya tidak jauh berbeda antara perjanjian yang satu dengan lainnya, biasanya memuat hal-hal sbb:

- a. Definisi – berisi mengenai arti/istilah teknis yang digunakan dalam perjanjian, biasanya berkisar pada hal-hal produk, *parts*, *technical information*, *know-how*, *territory*, *industrial property rights*, *royalty period*, *manufacturing facilities*;
- b. Scope – scope bantuan teknik yang akan diberikan pada sub ini berisi ttg informasi teknik (*technical information*) yang akan diberikan pemberi lisensi kepada penerima lisensi dan biasanya diuraikan secara detail bentuknya tsb dalam perjanjian;
- c. Royalty – merupakan kewajiban utama penerima lisensi yang harus dibayarkan kepada pemberi lisensi. Dalam klausul ini biasanya diatur detail bagaimana cara dan dalam mata uang apa royalty dibayar. Royalty biasanya dikenakan pada produk yang dilesensikan dan dikenakan pada komponen/parts yang biasanya menyertai produk yang dilesensikan;
- d. Lisensi/hak untuk menggunakan lisensi – dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi, apakah bersifat eksklusif atau non eksklusif;
- e. Ketentuan tentang pembatasan – klausul disini berisi tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan penerima lisensi terhadap *technical information* yang dilesensikan, terutama hal-hal berkait dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan teknik *know-how* terhadap pihak lain, atau mengambil langkah-langkah untuk mencegah keterbukaan informasi tentang teknis *know-how* pada pihak ketiga;
- f. Bahan baku pokok, bahan baku tambahan, dan komponen/parts – klausul ini mengatur kewajiban terlisensi untuk membeli bahan baku utama komponen parts dari pemberi lisensi. Pembelian selain dari pemberi lisensi hanya dimungkinkan apabila ada ijin tertulis dari pemberi lisensi;

- g. *Report dan Record* – klausul menyangkut kewajiban terlisensi untuk memberikan catatan-catatan dan melaporkan dalam tenggang waktu yang ditentukan semua hal yang berkaitan dengan jumlah produk dan komponen/parts yang telah berhasil dipasarkan serta hal-hal yang berkaitan dengan jumlah royalty yang dapat dibayar;
- h. Tanggung jawab produk – biasanya pelisensi menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan *claim* atau tuntutan-tuntutan kepada penerima lisensi oleh pihak ketiga, misalnya berkaitan dengan cacat produk, penyimpanan penggunaan penjualan atau transportasi dari setiap produk atau komponen/parts dimana *technical assistance* atau *know-how* untuk pemberi lisensi diterapkan pada produk tersebut;
- i. Perjanjian berlaku efektif – ketentuan ini mengatur tentang kapan perjanjian tersebut berlaku secara efektif dan bagaimana jika perjanjian tersebut harus diperbaharui;
- j. Keadaan memaksa dan kegagalan pada saat pelaksanaan – klausul ini biasanya menentukan bahwa kedua belah pihak akan bertanggungjawab atas semua kerugian yang persoalan tenaga kerja, kebakaran, kerusakan, tindakan pemerintah, bencana alam, dsb.
- k. Pengakhiran Hubungan – dapat dilakukan sebelum masa yang ditentukan berakhir yaitu karena penerima lisensi dianggap gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Disamping itu pengakhiran hubungan umum terjadi karena alasan yang berkaitan dengan terjadinya kepailitan atau keadaan tidak mampu membayar yang dialami oleh para pihak. Sebab yang lain dapat juga pengakhiran dikarenakan terjadinya likuidasi.
- l. Arbitrase dan hukum yang berlaku – hal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dan dengan hukum/aturan mana sengketa tersebut akan diselesaikan.

D. Perspektif Ekonomi HKI

Penggunaan prinsip-prinsip ekonomi dalam hukum merupakan pendekatan yang baru dikenal. Pendekatan ini berupa analisis ekonomi atas hukum yang merupakan pembahasan indisipliner yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh hukum terhadap tujuan-tujuan sosial dimana pembuat undang-undang harus mempunyai metode untuk mengevaluasi pengaruh-pengaruh hukum terhadap nilai-nilai sosial. Adapun tugas seorang ekonom memperkirakan pengaruh suatu kebijakan terhadap efisiensi (Sutedi, 2009:25).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi atas suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab memberikan kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Karya teknologi semisal di bidang transportasi, elektronik, perlengkapan rumah tangga dapat memanjakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan selalu up-to-date. Tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan peranannya dalam mendanai suatu penelitian dan percobaan untuk melahirkan suatu karya dan temuan produk baru. Namun mereka tetap enggan melakukan pendanaan dimaksud jika mereka tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang layak.

Butt (2000:41) menyebutkan bahwa alasan yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Butt (2000:175) selanjutnya menyebutkan Kekayaan Intelektual sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa baik internasional maupun domestik. Pendapat Butt tersebut menyiratkan kewajaran dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnnya terlebih dahulu. Penghormatan atas hak kekayaan intelektual harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian. HKI menambah nilai suatu barang yang akan diperdagangkan, bahkan dapat dikatakan nilai dari perdagangan HKI sangat besar. Impor mengenai HKI mempunyai

kontribusi terhadap peningkatan teknologi dan industri. Hal tersebut juga membantu di dalam peningkatan produktivitas dan membantu pemasaran dari produk tertentu. Jika warga negara Indonesia menjiplak HKI untuk dipergunakan di Indonesia akan membatasi pengalihan pengetahuan secara menyeluruh.

Jika HKI dikelola secara efektif maka terbuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk menggunakan aset HKInya guna peningkatan keuntungan dalam kompetisi dan strategi. Adalah lebih berarti melakukan komersialisasi invensi, pemasaran merek, desain atau hak cipta, melisensikan keahlian, mengadakan *join ventures* dan perjanjian kontrak HKI dibandingkan sekadar hanya mengejar perlindungan HKI oleh negara. Produk, merek dan desain kreatif muncul sehari-hari dalam pasaran merupakan hasil dari inovasi dan kreativitas manusia. Adalah aset penting yang dapat hilang begitu saja jika HKI dalam pasaran tidak mendapatkan perlindungan maksimal. Dengan mengambil keuntungan sepenuhnya dari sistem HKI memungkinkan perusahaan-perusahaan mendapatkan keuntungan dari kemampuan inovatif dan kreativitasnya yang mendorong dan membantu pendanaan inovasi selanjutnya melalui *corporate social responsibility (CSR)*.

Di dalam lisensi terkandung tiga pihak yang saling berhadapan jika ditinjau dari maksud yang mendasari pemberian HKI dan dorongan lisensi oleh negara dengan perlindungan dan mekanisme hukum.

Pertama, negara mendorong penyebaran aset HKI dalam rangka aksesibilitas manfaat produk bagi warga negara. Dalam alasan ini, negara berkepentingan akan lahirnya inventor yang senantiasa melakukan inovasi sehingga hasil-hasil invensi itu dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya baik dari segi materi maupun dalam kehidupan non-materi. Negarapun sesungguhnya berkepentingan atas devisa dari hasil penjualan produk HKI keluar negeri yang dilakukan melalui perluasan segmen pasar yang dilakukan dengan lisensi ke luar negeri. Di samping itu, faktor peningkatan kemampuan teknologi bagi anak bangsa menjadi tema penting dalam lisensi HKI.

Kedua, pemilik HKI (inventor/kreator) senantiasa mempublikasikan hasil invensinya dengan harapan ada pihak yang melirikinya dengan imbalan harga intelektual yang tinggi. Tidak sedikit pameran, publikasi jurnal (perguruan tinggi), tayangan internet yang bertujuan menyebarluaskan informasi penemuan dan ciptaan. Perusahaan-perusahaan melalui lembaga R&D (*Research and Development*)-nya melakukan penelitian terus menerus guna menemukan dan memodifikasi produk yang telah ada menjadi andalan dalam mengembangkan nilai ekonomi dari karyanya itu.

Ketiga, Pengusaha/pebisnis merupakan pihak yang paling berperan dalam penyebarluasan hasil invensi/kreasi. Melalui pihak inilah negara dan masyarakat menaruh harapan akan berkembangnya meluasnya hasil invensi yang dapat dengan mudah diperoleh dan menjadikan kehidupan lebih berarti, nyaman, berkualitas. Negara, Inventor, dan investor/pebisnis memainkan perannya masing-masing dalam mendorong lisensi HKI.

Beberapa permasalahan yang umumnya timbul dan dihadapi dalam komersialisasi HKI melalui mekanisme lisensi adalah sebagai berikut:

- a. Apakah para pihak tetap sebagai pemilik *know-how* (pengetahuan) atau invensi² yang sudah ada dengan memberikan lisensi kepada pihak lainnya? Lisensi artinya mendapat ijin untuk membuat, menjual, dan mendistribusikan barang yang dibuat berdasarkan *know-how* atau lisensi pemilikinya;
- b. Apakah *know-how* atau invensi yang berasal dari program penelitian dalam menjadi milik bersama, atau tetap menjadi milik dari pihak tertentu yang melakukan penelitian;
- c. Bagaimana hasil invensi tsb dilindungi, seperti paten dapat diakui?
- d. Apakah kewajiban para pihak untuk memelihara dan mempertahankan HKI, atau melindungi *know-how*, yang lahir dari mekanisme lisensi tsb.

Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Komersialisasi terhadap kekayaan intelektual dapat dilakukan dalam berbagai macam cara. Sebagaimana telah disampaikan di muka adalah dengan cara komersialisasi kekayaan intelektual adalah melalui lisensi. Cara komersialisasi kekayaan intelektual yang lain adalah penjualan (pengalihan hak) dan waralaba. Dalam penjualan atau pembelian kekayaan intelektual, hak-hak kepemilikan berasal dari penjual ke pembeli dan merupakan aktivitas satu-kali. Kekayaan intelektual tersebut dibeli atau dijual dengan harga yang disetujui. Berbeda dengan penjualan di mana hak keseluruhannya akan beralih, dengan lisensi pemberi lisensi sebagai pemilik kekayaan intelektual masih dapat mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut.

Ide, inovasi, dan ekspresi-ekspresi lain dari kreativitas manusia dapat menimbulkan hak pribadi yang dilindungi oleh undang-undang melalui sistem kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual telah memainkan peranan yang semakin besar dalam hubungan bisnis saat ini mengingat kekayaan intelektual merupakan aset yang dapat

diperdagangkan. Pengabaian terhadap perlindungan aset-aset kekayaan intelektual sudah pasti akan membahayakan bagi kesuksesan suatu perusahaan. Menurut WIPO Handbook, kekayaan intelektual secara luas berarti hak-hak hukum yang berasal dari aktivitas intelektual dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Sedangkan menurut Frederick Abbott, kekayaan intelektual mengacu ke sekumpulan produk tidak berwujud dari aktivitas manusia yang berhubungan dengan ide, ekspresi ide atau ekspresi identitas yang berasal dari seseorang, sementara hak kekayaan intelektual (HKI) berkenaan dengan sekumpulan kepentingan yang dapat dilaksanakan secara hukum dimana seseorang dapat memegang kekayaan intelektual.

Kekayaan intelektual dapat dikomersialisasi jika dapat dipasarkan secara efektif dalam bentuk produk atau jasa dan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya pengembangan produk, perlindungan kekayaan intelektual dan keuntungan yang pantas. Contoh-contoh kekayaan intelektual yang dapat dikomersialisasi adalah 1) teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau industri, 2) alat yang telah dikembangkan oleh pencipta untuk membantu dalam risetnya, seperti perangkat lunak atau pereaksi dan 3) teknologi yang menarik bagi suatu perusahaan. Dalam semua kasus komersialisasi membutuhkan modal, keahlian, sumber daya, manajemen, riset dan pengembangan yang berjalan, dan keberuntungan. Banyak invensi dapat dipatenkan, namun biasanya paten tidak diajukan kecuali invensi-invensi tersebut dapat dikomersialisasi. Perlindungan kekayaan intelektual yang efektif dapat menjadi mahal, contohnya telah diperkirakan bahwa lebih dari 90 persen dari semua paten gagal menghasilkan keuntungan keuangan bagi pemilik paten.

Aset-aset intelektual yang tidak berwujud (*intangible*) merupakan sumber penghasilan yang berarti bagi banyak perusahaan dimana studi-studi menunjukkan bahwa saat ini lebih dari setengah nilai pasar perusahaan bersumber dari merek, teknologi-teknologi yang dipatenkan dan keahlian intelektual. Akibatnya komersialisasi aset-aset intelektual telah menjadi kekuatan dominan dan menggerakkan ekonomi dunia, yang memaksa bisnis-bisnis untuk mengatur secara aktif peranan hak kekayaan intelektual untuk mengkomersialisasi dan mengkapitalisasi aset-aset pengetahuannya. Kekayaan intelektual sebagai aset dapat ditingkatkan nilainya melalui lisensi. Dengan pemberian lisensi dapat menciptakan sumber pendapatan, menyebarkan teknologi ke kelompok pengguna dan pengembang potensial yang lebih luas dan berfungsi sebagai katalis untuk pengembangan dan komersialisasi lebih lanjut.

Aset-aset kekayaan intelektual dapat dieksploitasi secara komersial oleh pemiliknya atau oleh pihak lain dengan izin dari pemiliknya. Komersialisasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat menutup biaya pengembangan produk. Hal itu dapat dilakukan dengan penjualan (pengalihan hak) bila pemilik tidak mempunyai pengalaman dalam memasarkan produknya dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan sehari-hari di bidang teknologi. Sebaliknya, bila pemilik kekayaan intelektual mempunyai pengalaman dalam pemasaran dan ingin memperoleh pendapatan tambahan yang berkelanjutan maka lisensi dapat menjadi cara untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut. Kata “lisensi” secara sederhana berarti izin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual bagi pihak lain untuk menggunakannya berdasarkan syarat dan kondisi yang disetujui, untuk tujuan tertentu, dalam wilayah tertentu dan selama periode waktu yang disetujui.

E. Penutup

Komersialisasi HKI merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengembangkan nilai ekonomi suatu produk dan proses HKI. Di samping itu aspek penyebaran nilai manfaat invensi kepada masyarakat juga tidak kalah pentingnya sebab salah satu manfaat HKI adalah terjadinya kemudahan dalam kehidupan manusia akibat tersebarnya produk-produk HKI yang akan mengindikasikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Hal yang tidak kalah penting dalam penyebaran HKI adalah alih teknologi (*transfer of technology*), hal ini melibatkan peran penting negara, pemilik/pemegang HKI, dan investor yang percepatannya dapat dilakukan dengan lisensi. Aspek komersialisasi HKI melalui lisensi dapat menjadi titik tolak dalam menentukan mendorong kelancaran penyebaran aset HKI.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komersialisasi HKI melalui lisensi sebagai berikut:

- a. Hak kekayaan intelektual berhubungan dengan komersialisasi karena kekayaan intelektual mempunyai karakteristik sebagai aset yang dapat menghasilkan pendapatan yang diterima dari penggunaan atas kekayaan intelektual tersebut dalam kegiatan yang bersifat komersial;
- b. Komersialisasi kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penjualan aset, lisensi dan waralaba. Dalam bidang teknologi cara komersialisasi yang umum dilakukan adalah dengan cara lisensi;

- c. Peraturan Pemerintah mengenai lisensi harus segera dikeluarkan untuk mencegah terjadinya konflik pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat merugikan pelaku bisnis terkait dan pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Daftar Pustaka

- 1) Peraturan Perundangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>
- 3) Anwar, Chairil. 2000. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Pustaka Pelajar, Jakarta.
- 4) Butt, Simon. 2000. *Penuntun Short Course Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group, Jakarta.
- 5) Syahmin AK. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Rajagrafindo, Persada, Jakarta.
- 6) Haryanto, Ignatius. 2002. *Penghisapan Rezim HAKI*. Debt Watch-Kreasi Wacana, Jogjakarta.
- 7) Makkawaru, Zulkifli. 2001. “Perlindungan Paten dan Kewajiban Alih Teknologi” dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Clavia* Volume 2 Nomor 1 Januari 2001.
- 8) Margono, Suyud dan Angkasa, Amir. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Grasindo, Jakarta.
- 9) Odop, Nastains. 2007. *Berbisnis Waralaba Murah*. Media Pressindo, Yogyakarta.
- 10) Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 11) Saleh, Ruslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Sinar Grafika, Jakarta
- 12) Sujatmiko, Agung. 2008. “Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha” dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, April 2008, Volume 26 No. 2
- 13) Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta.
- 14) Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi*. Rajawali Pers, Jakarta
- 15) Anwar, Chairil. 2000. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

- 16) Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo (editor), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd dan PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 332.
- 17) Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Bahan Kuliah Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2006, hlm. 12